



ASYIKpublisher

Catatan Harian

Ahmad Syaikhu

[JANUARI - FEBRUARI 2020]



Catatan Harian
Ahmad Syaikh
[JANUARI - FEBRUARI 2020]



Penulis:

Ahmad Syaikh

Editor:

Erwyn Kurniawan

Cetakan Ke-I

Maret 2020

Diterbitkan oleh:

Asyikpublisher

Percetakan:

Asyikpublisher



Kerja-kerja politik harus terus kita lakukan. Tak kenal musim. Sepanjang waktu. Ada atau tidak ada pemilu. Karena politik sejatinya adalah pengabdian. Bukan hamba kekuasaan.

—AHMAD SYAIKHU—

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	vii
-------------------------	-----

CATATAN HARIAN

Kompak Membantu DPW PKS Bali: Implementasi Ukhuwah.....	1
Banjir Datang, Saatnya Kita Bergandengan Tangan.....	5
Membantu Korban Banjir di Kabupaten Bekasi.....	8
Reses Selesai, Tapi Memperjuangkan Aspirasi Tak Pernah Usai	11
Jiwasraya: Ujian Keberpihakan Partai kepada Rakyat.....	14
Robek: 13 Tahun Berkpirah Mengajak Masyarakat Mencintai Sepeda.....	17
Mencari Solusi Membangun Negeri	19
Penanganan Banjir Ibukota di Hulu.....	23
Tiga Alasan Tarif Tol Tidak Boleh Dinaikkan.....	26
Mengunjungi Tiga Lokasi Banjir di Banten	30
Jangan Menunggu Ada Korban, Baru Dilakukan Perbaikan	33
Belajar Dari NU	36
Kundapil: Satu Hari Empat Lokasi	39
Menerima Delegasi TETO Taiwan	42
Di Jayapura, Suara Imam Masjid Bagai di Masjidil Haram	44
Fraksi PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS.....	47
Kami adalah Keluarga Besar PKS.....	50

Longsor di Ponpes Futuhiyat Banten	52
SKOUW, Wilayah Perbatasan yang Membanggakan.....	55
Gus Sholah, Kami Kehilangan Engkau.....	59
Alhamdulillah, Gedung SDN 04 Samudrajaya Akhirnya Diperbaiki	62
Belajar Tani ke Pak Heri di Sukoharjo.....	64
Agama dan Pancasila Satu Tarikan Nafas.....	68

RILIS MEDIA

Tol Cipali KM 136 Banjir, Ahmad Syaikh Berikan Tiga Rekomendasi	72
Ahmad Syaikh Berikan Bantuan ke Korban Banjir di Kabupaten Bekasi	74
Proyek Kereta Cepat Jadi Penyebab Banjir Tol Japek, Ahmad Syaikh Pertanyakan Amdal.....	76
Ahmad Syaikh Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Duduk Bersama Atasi Banjir.....	79
Surel Bocor, Ahmad Syaikh: Pemerintah harus Dukung Gugatan Keluarga Korban Lion Air JT 610 kepada Boeing	82
Kunjungi SDN 04 Samudrajaya, Ahmad Syaikh: Jangan Tunggu Ada Korban Baru Diperbaiki.....	84
Syaikh: Perlu Kajian Khusus Dana Otsus.....	86

Ada Ketidakadilan, Ahmad Syaikh: Tunda Kenaikan Tarif Jalan Tol.....	88
Respons Aspirasi APBMI, Ahmad Syaikh Desak Pemanggilan Menteri Perhubungan.....	92
Bertemu Bupati Bekasi, Ahmad Syaikh Minta SDN Samudrajaya 04 Segera Diperbaiki.....	94
SDN 04 Samudrajaya: Viral, Dikunjungi Syaikh, Disusul Bupati Bekasi dan Diperbaiki.....	95
Syaikh Ajak Mahasiswi Hidupkan Tradisi Literasi.....	97
Ahmad Syaikh: Ada 8 Langkah Jadikan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta Tetap Lumbung Padi Nasional.....	99
Ahmad Syaikh Serap Aspirasi Warga Karangligar Karawang yang Terkena Banjir Parah.....	104
Syaikh Fokus Perjuangkan Pengembangan Sektor Pertanian	106
Pelayanan Buruk, Ahmad Syaikh: Tunda Kenaikan Tarif Jalan Tol Dalam Kota!.....	108

PENGANTAR PENULIS

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah, buku Catatan Harian Ke-2 saya sudah terbit. Saya patut bersyukur kepada Allah SWT sebab apa yang saya cita-citakan sejauh ini masih terwujud.

Sejak dilantik menjadi Anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019, saya memang bertekad untuk menuliskan aktivitas saya. Juga ide atau gagasan yang saya miliki. Tujuannya, agar apa yang saya lakukan bisa diketahui oleh masyarakat, terutama di dapil saya, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Seperti yang sudah saya singgung dalam buku Catatan Harian Ke-1, hadirnya buku ini jadi pertanggungjawaban moral (moral obligation) saya kepada konstituen. Mereka berhak tahu apa yang saya kerjakan sebagai wakil mereka di parlemen. Dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan. Atau bahkan jam ke jam.

Dalam perjalanannya memang tidak mudah. Terkadang kesibukan membuat saya sulit menuangkan apa yang ada di pikiran ke dalam tulisan. Tapi, karena saya sudah bertekad bulat, maka seoptimal mungkin saya membuat tulisan,

meski kelelahan dan padatnya jadwal melanda.

Di buku kedua ini, ada satu kunjungan yang paling berkesan. Yaitu saat ke SDN 04 Samudrajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sekolah tersebut viral videonya di media sosial karena rusak parah. Saya datang, bertemu dengan pihak-pihak terkait dan berjanji akan menyampaikan ini kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Sepekan berselang, Allah takdirkan saya bertemu Bupati Eka. Lalu saya sampaikan soal sekolah tersebut dan meminta beliau untuk segera memperbaiki. Alhamdulillah, Bupati Eka respons sangat cepat dan segera memperbaikinya.

Di luar itu, ada peristiwa lainnya yang juga berkesan. Seperti kunjungan ke korban banjir di Karawang, bersua dengan rekan-rekan media dan sebagainya.

Doakan agar saya terus istiqomah menjalankan amanah berat ini. Insya Allah doa dan dukungan dari semua pihak akan memudahkan langkah-langkah saya.

Tak lupa saya mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Bekasi, 20 Februari 2020

Ahmad Syaikh



KOMPAK MEMBANTU DPW PKS BALI: IMPLEMENTASI UKHUWAH

JUM'AT (27/12) jadi hari tak terlupakan. Bagi saya dan pastinya juga kader PKS lainnya. Hari itu di Bali, banyak pimpinan PKS berkumpul di Denpasar.

Ada Ketua Wilayah Daerah (Wilda) Nusa Bali Ustadz Sugeng Susilo; Ketua Wilda Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta (Jatijaya) Sigit Sosiantomo; Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi, Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Fakhri, Ketua DPW PKS Jatim Irwan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Quatly), Wakil Ketua DPRD Karanganyar (Rohadi) dan Wakil Walikota Salatiga (Muhammad Haris). Dan saya sendiri sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat.

Kami datang tidak sendiri. Tapi bersama rombongan kader lainnya. Ada yang melalui jalur darat dan udara. Dengan niat yang sama: membantu saudara-saudara kami yang sedang kesulitan dalam perjuangannya di jalan dakwah.

Ya, kami berkumpul di Bali bukan untuk pesiar atau mengadakan rapat koordinasi dan kerja. Tapi bersepakat untuk membantu DPW PKS Bali dalam memenuhi sarana prasarana kantor maupun transportasi.

Sekitar sebulan lalu saya hadir di Bali. Kala itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana kondisinya. DPW PKS Bali berkantor bersama dengan DPD PKS Denpasar di kantor sebuah DPC. Sungguh suasana yang jauh dari kelayakan. Mereka juga tidak memiliki sarana transportasi. Hati ini sungguh teriris-iris.

Fenomena ini memantik kepedulian beberapa Wilda dan DPW untuk berkontribusi, membantu DPW PKS Bali.



Dengan menolong saudara-saudara kami, ada pesan yang ingin kami sampaikan. Bahwa DPW PKS Bali tidak sendirian dalam menghadapi masalah dan mengatasi kesulitan. Seluruh DPW se-Indonesia siap kebersamai dan membantunya.

Alhamdulillah, untuk tahap awal terkumpul sejumlah dana dari Wilda Jatijaya, DPW PKS Jawa Tengah, DPW PKS Yogyakarta, DPW PKS Jawa Timur, DPW PKS Banten dan sebuah mobil Fortuner dari DPW PKS Jawa Barat serta satu mobil ambulan dari Majelis Keluarga Arrihlah Jakarta. Dengan dana yang terkumpul, DPW PKS Bali dapat menyewa dua ruko untuk kantor.

Berkumpulnya kami di Bali juga dalam rangka menghadiri peresmian Penggunaan kantor DPW PKS Bali dan penyerahan mobil operasional untuk DPW PKS Bali. Malam

itu, Kantor DPW PKS Bali peresmian penggunaannya dilakukan oleh Ketua Wilda Nusa Bali Ust. Sugeng Susilo, mewakili Presiden PKS.

Kami berkomitmen, ini bukanlah bantuan yang terakhir. Kami siap terus kebersamai DPW PKS Bali sehingga bisa bangkit kembali. Itulah sebabnya kami juga mensosialisikan tagar #PKSBalibangkit. Semoga akan bisa terwujud.

Ya Allah, kokohkanlah ukhuwah kami, jangan porak-porandakan ikatan di antara kami. Aamiin.



**Kami berkomitmen, ini
bukanlah bantuan yang
terakhir. Kami siap terus
bersama DPW
PKS Bali sehingga bisa
bangkit kembali.**



BANJIR DATANG, SAATNYA KITA BERGANDENGAN TANGAN

Memasuki Tahun 2020, banjir datang menerjang. Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang. Menurut Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD), di Kabupaten Bekasi yang merupakan dapil saya, ada 63 titik daerah yang terendam air.

Banjir kali ini datang hadir tak terduga. Sebab musim penghujan baru di awal. Biasanya puncak banjir terjadi pertengahan Januari dan Februari. Di sisi lain, luas wilayah dan jumlah korban yang terdampak juga besar.

Siapun tak ingin mendapatkan musibah. Banjir menerjang tak melihat siapa kita. Anak kecil, ibu-ibu, nenek dan kakek tak luput jadi korban.



Ini bukan saatnya kita mengutuk. Bukan saatnya marah. Bukan saatnya juga berkeluh-kesah dan saling menyalahkan. Ini saat yang tepat bagi kita untuk saling bahu-membahu. Saling membantu. Saling memeluk erat. Dan saling bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin saya bangga dengan institusi dan para relawan, khususnya relawan-relawan

PKS yang sedemikian sigap dan gesit untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan.

Teruslah bergerak membantu para korban yang memerlukan bantuan. Sambil melafazkan doa saat musibah semacam ini hadir, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW:

"Allahumma hawaa'ainaa wala'aa'ainaa. Allahumma 'alal aakaami wadz dzirabi wa buthuunil awdiyati wa manabitis syajari."

"Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan yang merusak kami. Ya, Allah! turunkanlah hujan di dataran tinggi, di bukit-bukit, di perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan."

Do'a ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik _radhiyallahu 'anhu_, ketika hujan tak kunjung berhenti (dalam sepekan), Nabi _shallallahu 'alaihi wa sallam_ lantas memohon pada Allah agar cuaca kembali cerah. Lalu beliau membaca do'a di atas. (HR. Bukhari no. 1014 dan Muslim no. 897).

Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dan segera Allah mudahkan dalam mengatasi musibah ini dan saudara-saudara kita bisa bangkit kembali membangun optimisme masa depan. Amin.



MEMBANTU KORBAN BANJIR DI KABUPATEN BEKASI

Wajah-wajah lelah dan pasrah saya lihat langsung, Kamis (2/1/2020). Mereka menjadi korban banjir yang melanda Kabupaten Bekasi. Bau khas endapan lumpur dan sampah paska banjir menyengat hidung.

Kemarin saya bersama rekan-rekan dari Asyikpreneur datang ke tiga lokasi. Bermula ke Perumahan Papan Mas, Kampung Kobak, Mekar Sari, Tambun Selatan. Sekitar pukul 11.00 WIB saya tiba. Melihat kesigapan kader-kader PKS di Posko Dapur Umum. Juga menyaksikan warga yang tetap semangat membersihkan rumahnya dari terjangan air.

Lalu berlanjut ke Perumahan Trias di Cibitung. Air masih tinggi. Sepinggang orang dewasa. Lampu masih mati. Saya berdialog dengan tokoh masyarakat setempat. Di antaranya Pak Tarmuji dan Pak Lili. Keduanya memaparkan kondisi terkini yang dihadapi. Sangat memprihatinkan.

Terakhir menyambangi Posko Dapur Umum di Perumahan Tridaya, Tambun Selatan. Kaum ibu yang merupakan kader dan simpatisan PKS tampak bersemangat. Mereka memasak nasi dan lauk pauk untuk dibagikan kepada korban banjir. Padahal rumah mereka juga tergenang air.

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di lapangan, kondisi banjir saat ini lebih parah dari sebelumnya. Bahkan melebihi siklus banjir lima tahunan. Warga mengeluhkan tentang masih belum meratanya bantuan logistik. Juga keterbatasan sarana evakuasi seperti perahu karet.

Ini memang bukan saat yang tepat menyalahkan pihak lain. Tapi sebagai bahan evaluasi, hal semacam ini perlu

disampaikan. Agar ke depan ada perbaikan sehingga ketika banjir datang, dampak kerusakan bisa dikurangi dan korban yang jatuh tidak banyak.

Mari terus membantu korban banjir. Sebab mereka adalah saudara-saudara kita. Dan musibah ini adalah ujian kita semua.





RESES SELESAI, TAPI MEMPERJUANGKAN ASPIRASI TAK PERNAH USAI

Tiga pekan yang penuh cerita. Kira-kira itulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan kegiatan reses saya, dari 18 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020. Ini adalah Reses Pertama Anggota DPR RI dalam Masa Sidang 2019-2020.

Ada sekitar 15 titik yang harus saya kunjungi. Tersebar di Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Beragam elemen masyarakat saya temui. Ada wartawan, buruh, driver ojek online, guru, petani, ulama, santri hingga bupati.

Beraneka aspirasi saya terima. Saat bersua buruh di Purwakarta, mereka menyampaikan soal daya serap industri terhadap penduduk lokal. Mereka mengeluhkan tentang belum optimalnya tingkat daya serap

Saat berdialog dengan wartawan di Purwakarta, mereka bertanya banyak hal. Lalu menyatakan kesiapannya bersinergi dengan saya untuk memajukan Purwakarta.

Ketika bertemu dengan kyai dan santri, mereka bertanya tentang RUU Perlindungan Tokoh Agama. Sebab sampai hari ini, masih saja terjadi tindakan-tindakan penistaan terhadap ulama.

Ketika bersilaturahmi dengan Bupati Karawang Cellica Nurachadiana dan jajarannya, kami membahas isu-isu lokal. Dari Tata Ruang, pencegahan banjir dan sebagainya.

Kami juga bersepakat untuk bersinergi memajukan Karawang.

Saat berdialog dengan warga Kabupaten Bekasi, mereka bertanya soal iuran BPJS yang naik, musibah banjir hingga jalan yang rusak. Juga tentang harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik.

Saya mendengar dan mencatat semua aspirasi tersebut. Bahkan saya sediakan lembaran khusus bagi masyarakat yang tak sempat bertanya. Apa yang mereka keluhkan dan rasakan dituliskan dalam kertas tersebut.

Semua aspirasi tersebut insya Allah tak hanya akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Saya bersama rekan-rekan Anggota DPR dari Fraksi PKS akan berikhtiar seoptimal mungkin memperjuangkannya.

Tentu saja tidak mudah. Tapi dengan upaya yang gigih dan dukungan serta doa dari kita semua, insya Allah akan terwujud.

Reses memang sudah selesai. Namun memperjuangkan aspirasi tak pernah usai. Dan Senin, 13 Januari mendatang, saat saya kembali ke Senayan, upaya itu sudah harus saya lakukan.

Mohon terus doakan dan berikan dukungannya...



JIWASRAYA: UJIAN KEBERPIHAKAN PARTAI KEPADA RAKYAT

Seorang perempuan paruh baya tampak sedih. Namanya KimKim Ki-Bong, warga negara Korea Selatan. Dia mengadukan nasib buruknya sebagai

nasabah Jiwasraya kepada anggota Komisi VI DPR RI, 4 Januari silam.

Dalam bahasa Indonesia, Ki-Bong mengisahkan kepedihannya sebagai nasabah korban gagal bayar polis produk bancassurance JS Proteksi Plan. Ki-BongKi-Bong adalah seorang janda ekspatriat di Indonesia. Setelah sang suami meninggal dunia, Ki-Bong hendak pulang ke Korea. Namun, ia tak dapat mewujudkannya karena uang yang ia dan sang suami kumpulkan di PT Asuransi Jiwasraya selama ini, tidak bisa diambil.

"Suami saya sudah meninggal, saya mau pulang ke Korea tapi tidak bisa, karena tunggu uang. Di sini sehari-hari juga perlu uang. Saya tunggu uang saya sampai kapan? Uang saya kemana? Di mana? Ada masalah apa? Saya mau tahu," untkap Ki-Bong.

Tak hanya ada satu Ki-Bong. Berdasarkan catatan, ada 469 nasabah asing yang bernasib serupa dengan Ki-Bong. Belum lagi nasabah dari dalam negeri.

Kasus Jiwasraya ini sungguh mengejutkan sekaligus memalukan. Sebab, yang menjadi korban bukan hanya rakyat Indonesia, tapi juga orang asing. Jumlah kerugiannya pun fantastis: Sekitar Rp 13,7 Triliun. Melebihi Skandal Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun.

Ini jelas-jelas kejahatan keuangan yang sistemik, rapi dan canggih. Publik baru mengetahuinya ketika persoalan

ini sudah sangat memburuk.

Alhamdulillah, saya bersyukur menjadi kader PKS. Sebab dengan cepat, PKS merespons isu ini. Dan Rabu, 15 Januari kemarin, sebanyak 50 anggota DPR dari F-PKS menggulirkan dukungan pembentukan Pansus Jiwaseraya.

Yang menyedihkan, ada keinginan dari mayoritas fraksi untuk menjadikan kasus ini sebatas panja. Bukan pansus. Jika benar ini terjadi, sungguh teramat menyedihkan.

Kasus Jiwaseraya jadi ujian partai. Sejauh mana partai politik berpihak kepada kepentingan rakyatnya. Di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang kian sulit, harga-harga sembako naik, subsidi gas 3 Kg akan dicabut dan seterusnya, sungguh tak elok jika Para Wakil Rakyat menutup mata dengan hanya menjadikan kasus Jiwaseraya diselesaikan melalui panja.

Semoga Allah SWT menunjukkan yang benar itu benar. Dan yang salah itu salah.

Aamiin.



**Kasus Jiwaseraya jadi ujian partai.
Sejauh mana partai politik berpihak
kepada kepentingan rakyatnya.**



ROBEK: 13 TAHUN BERKPIRAH MENGAJAK MASYARAKAT MENCINTAI SEPEDA

Ahad (19/1) menjadi hari yang membahagiakan bagi saya. Di tengah padatnya agenda kegiatan, saya bisa kebersamai sahabat-sahabat saya di komunitas sepeda Rombongan Bekasi(Robek).

Hari itu, Robek merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Cukup panjang usia komunitas ini. Kiprahnya mengajak orang bersepeda tak hanya di Bekasi. Bahkan, melewati batas Bekasi.

Kalau diperhatikan, dalam lima tahun terakhir di halte-halte bus di Kota Bekasi, sebagian kita jumpai kampanye bersepeda dari berbagai komunitas sepeda. Untuk diketahui, itu dipelopori oleh Robek.

Saya bangga, Bekasi yang sempat dibully sekitar tujuh tahun yang lalu karena kemacetan dan sebagainya, tapi masih ada warganya yang menjadi pionir kebaikan secara nasional. Salah satunya Robek. Mereka tegar, tak terpengaruh dengan stigma negatif terhadap Kota Bekasi.

Saya pernah bike to work bersama teman-teman Robek menuju DPR RI. Satu hal yang sering dikeluhkan para pesepeda adalah, jalur sepeda masih sangat minim. Para Biker tersisih oleh kendaraan bermotor dan itu sangat membahayakan.

Semoga ke depan pemerintah dan pemerintah daerah akan lebih banyak lagi menyiapkan jalur-jalur khusus sepeda.



MENCARI SOLUSI MEMBANGUN NEGERI

Rabu (22/1/20), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berdiskusi dan tukar gagasan dengan jajaran Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Temanya terkait otonomi khusus.

Kami diterima oleh Wakil Rektor IPDN (Prof. DR. Khasan Effendie, M.Pd) sebagai pimpinan. Didampingi oleh Kepala Lembaga Research dan Pengkajian Strategi Teknologi Pemerintahan Prof. Sadu Wasistiono, MS,

Guru Besar Program Studi Doktor Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA, Wakil Rektor Bidang Administrasi Prof. Dr. Rizari, M.BA., M.Si, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Dr. Ismail Nurdin, M.Si, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Dr. Muhadam Labolo, M.Si, Dosen Fungsional IPDN Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H, dan Lektor Kepala Fakultas Manajemen Pemerintahan Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., CA.



“

Jika masing-masing daerah diberikan kekhususan dan keistimewaan maka tidak ada lagi yang khusus dan istimewa.

Diskusi berlangsung hangat. Banyak ide atau gagasan menarik terlontar. Prof. Sadu mengingatkan bahwa dalam pembahasan otonomi khusus dan keistimewaan ini belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sejauh ini, evaluasi hanya dilakukan secara parsial.

Prof. Ngadisah mengingatkan bahwa dalam pendekatan penyelesaian masalah, jangan hanya mempertimbangkan faktor finansial karena seringkali ini yang menyebabkan

konflik. Ia lebih cenderung melakukan pendekatan antropologi melalui pendekatan budaya, mendorong produktivitas Orang Asli Papua (OAP) melalui pendidikan dan keterampilan.

Dr. Muhadam memberikan masukan perlunya dibentuk lembaga baru yang khusus menangani kuasa otonomi khusus. Institusi ini dibedakan dengan kuasa otonomi daerah sehingga pertanggungjawabannya lebih jelas.

Saya sependapat dengan apa yang digagas oleh Prof. Sadu. Evaluasi secara menyeluruh terhadap dana otonomi khusus dan dana keistimewaan perlu dilakukan sehingga didapatkan solusi yang terbaik untuk negeri ini.

Memang, kebijakan asimetris dapat berdampak pada kecemburuan daerah-daerah lain. Sebagai contoh Bali juga menginginkan keistimewaan dengan budaya dan pariwisatanya. Daerah-daerah lainnya punya keistimewaan masing-masing. Jika masing-masing daerah diberikan kekhususan dan keistimewaan maka tidak ada lagi yang khusus dan istimewa.

Ke depan perlu ada perumusan yang lebih tepat dan berkeadilan dalam melakukan distribusi DAU dan dana lainnya, sehingga masing-masing daerah merasa puas dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pada kesempatan diskusi ini, saya juga sempat lontarkan gagasan apakah memungkinkan dilakukan sister

province, antara provinsi yang memiliki kapasitas fiskal yang baik dengan provinsi yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, yang sifatnya mandatory.

Lebih dari itu semua, yang perlu dimiliki oleh seluruh elemen bangsa ini adalah sikap kenegarawanan seperti halnya para the founding father negeri ini. Yang orientasinya adalah apa yang bisa saya berikan bukan apa yang bisa saya terima untuk negeri kita tercinta. Di sinilah pendekatan antropologi diperlukan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Ngadisah.

Semoga ke depan akan didapatkan rumusan yang lebih baik dan berkeadilan, sebagai solusi untuk membangun negeri. Aamiin



Lebih dari itu semua, yang perlu dimiliki oleh seluruh elemen bangsa ini adalah sikap kenegarawanan seperti halnya para the founding father negeri ini.



PENANGANAN BANJIR IBUKOTA DI HULU

Sekitar tujuh tahun lalu, di Bendungan Katulampa Bogor, saat menjadi Wakil Walikota Bekasi, saya menghadiri pertemuan dengan Gubernur DKI (Jokowi), Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan), Bupati Bogor (Rahmat Yasin) dan Walikota Bogor (Bima Arya). Dihadiri juga oleh para pejabat Kementerian PUPR.

Kami membahas bagaimana mengatasi banjir Ibukota.

Salah satu kesimpulannya adalah pembuatan bendungan di Ciawi dan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

Tujuh tahun kemudian, tepatnya Kamis (23/1/20), saya bersama teman-teman Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik secara langsung ke Bendungan Ciawi Bogor untuk melihat perkembangan pembangunan bendungan tersebut. Bendungan dengan luas genangan 39,4 hektar ini memiliki kapasitas tampung 6,05 juta meter kubik.



Pada saat kunjungan, progress pekerjaan konstruksi di lapangan baru mencapai 43,97 persen. Bendungan dengan biaya konstruksi hampir 800 milyar ini insya Allah akan selesai dan bisa dimanfaatkan pada tahun 2021.

Sayangnya, Bendungan Ciawi ini hanya untuk satu manfaat, yaitu mereduksi banjir 111,75 m³ per detik. Tidak digunakan untuk irigasi, sebagai air baku maupun sebagai penghasil energi listrik. Padahal warga di sekitar bendungan

berharap pemerintah menyiapkan air bersih untuk warga.

Lebih ke arah hulu Sungai Ciliwung, dibangun juga Bendungan Sukamahi dengan luas genangan 5,25 hektar yang akan mereduksi banjir 15,47 m³ per detik. Bendungan Sukamahi dengan biaya konstruksi 453 milyar lebih ini progressnya baru mencapai 37 persen.

Semoga dengan selesainya dua bendungan ini mampu mereduksi 127,22 m³ dan mampu mengurangi banjir ibukota.

Dibutuhkan kerjasama semua pihak agar banjir di ibukota dapat teratasi. Bukan saling mencari-cari alasan dan kesalahan.



Dibutuhkan kerjasama semua pihak agar banjir di ibukota dapat teratasi. Bukan saling mencari-cari alasan dan kesalahan.



TIGA ALASAN TARIF TOL TIDAK BOLEH DINAIKKAN

Pagi ini, Rabu (29/1), saya jadi nara sumber acara yang disiarkan langsung oleh TV Parlemen. Isunya soal kenaikan tarif tol Dalam Kota oleh pemerintah. Diberlakukan pada awal Februari 2020.

Kenaikan tarif tol tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Nomor 1231/KPTS /M/2019. Ruas tol dimaksud adalah Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Selain dinaikkan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) juga melakukan penyederhanaan menjadi 3 golongan, yakni:

1. Golongan I : Rp.10.000,-
2. Golongan II (2019) : Rp. 15.000,-
3. Golongan III (2019): Rp. 17.000,-

Tarif Golongan II (2017) mengalami kenaikan hingga 30,43% sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan. Padahal, pemilik kendaraan golongan II didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM).

Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV (2017) dan V (2017) (sekarang menjadi Golongan III (2019) yang mayoritas dimiliki oleh korporasi.

Sesuai aturan yang tercantum dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan 2 tahun sekali. Terakhir tarif tol ini mengalami kenaikan pada Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan tarif yang lalu, maka golongan I mengalami kenaikan sebesar 5,26%, Golongan II (2017) naik sebesar 30,43%, Golongan III (2017) turun sebesar 3,22% (sekarang menjadi Golongan II (2019)), Golongan IV (2017) turun

sebesar 10,52% (sekarang menjadi Golongan III (2019)), Golongan V (2017) turun sebesar 26,09% (sekarang menjadi Golongan III (2019)).

Ada tiga catatan kritis saya terkait ini. Pertama, ada ketidakadilan. Sebab Tarif Golongan II (2017) naik hingga 30,43%, sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan. Padahal, pemilik kendaraan golongan II didominasi oleh UMKM.

Kedua, kenaikan yang mencapai 30,43% melanggar Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Jika tetap dinaikkan, pemerintah harus tetap berpedoman kepada Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pasal 67 dimana penyesuaian tarif tol harus ditetapkan berdasarkan laju inflasi. Dan juga memastikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terpenuhi dengan memperhatikan kepuasan pelanggan pengguna tol.

Berdasarkan inflasi 2018 dan 2019, dengan asumsi SPM terpenuhi, maka seharusnya kenaikan tidak melebihi 6% dari tarif sebelumnya. Sesuai Pasal 48 ayat (1), Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

Ketiga, soal pelayanan. Kenaikan tarif tol semestinya

diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Fakta memperlihatkan pelayanan tol dalam kota merosot kualitasnya.

Arus lalu lintas masih macet parah. Jalan masih banyak yang perlu diperbaiki. Tidak cepatnya respons operator jalan tol dalam membantu bila ada kendaraan yang mengalami masalah. Bahkan sejumlah ruas jalan masih tergenang banjir saat hujan deras seperti belum lama ini terjadi. Ini mencerminkan masih buruknya pelayanan yang diberikan.

Dengan kondisi ini, seharusnya tarif Tol Dalam Kota diturunkan, bukan malah dinaikkan. Oleh karena itu, saya minta Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol mengevaluasi kebijakannya. Apalagi kondisi rakyat sedang lemah daya belinya.



**Fakta memperlihatkan
pelayanan tol dalam kota
merosot kualitasnya.**



MENGUNJUNGI TIGA LOKASI BANJIR DI BANTEN

Senin Januari 2020, sejak pagi hingga sore saya berada di Banten. Bersama Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri, Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr Jazuli Juwaini, pimpinan DPW PKS Banten dan kader, saya mengunjungi tiga lokasi banjir bandang di Lebak.



Pertama ke Desa Somang, Kecamatan Sajira. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Rumah-rumah warga hanyut dan rusak tersapu air yang datang menggenas. Jembatan yang menghubungkan dengan desa lainnya terputus. Insya Allah, untuk hal ini, saya akan menyampaikannya kepada Kementerian PUPR sebagai mitra kerja Komisi V DPR, tempat saya bernaung.

Kami datang untuk menghibur mereka. Mengapa dan memberikan bantuan. Sebelum kami hadir, kader-kader PKS sudah sejak awal membuka posko. Hingga hari ini sudah 14 hari lamanya. Warga mengatakan sendiri, kader PKS yang pertama kali datang dan membantu mereka.

Habib Salim meminta kader PKS untuk terus membersamai warga. Bantu seoptimal mungkin. Kader PKS harus dekat dengan masyarakat di saat mereka mendapatkan ujian.

Setelah itu, ada dua titik lokasi yang kami kunjungi. Keduanya pondok pesantren. Yakni Pondok Pesantren Latansa dan Futuhiyat. Sarana dan prasarana rusak diterjang banjir bandang.

Saya berharap Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan terkait lainnya harus secepat mungkin memperbaiki sarana dan prasarana umum yang rusak. Tentunya juga termasuk fasilitas sekolah. Agar kehidupan masyarakat kembali normal dan kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti semula.

Semoga ujian ini segera berlalu. Mereka yang menjadi korban diberikan kekuatan dan kesabaran. Juga pahala berlimpah atas musuibah yang mereka alami.

Dan tak lupa, saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada seluruh kader dan relawan PKS yang sejak hari pertama membantu warga. Teruslah berkhidmat kepada rakyat.



JANGAN MENUNGGU ADA KORBAN, BARU DILAKUKAN PERBAIKAN

Hari ini, saya menyediakan waktu khusus untuk mengunjungi SDN Samuderajaya 04 di Desa Samudera Jaya, Kecamatan Tarumajaya Kabu-

paten Bekasi. Kunjungan saya lakukan, setelah melihat tayangan video kerusakan parah sekolah tersebut yang viral di media sosial.

Sungguh ironis. Lokasi sekolah ini berada tak jauh dari DKI Jakarta, ibukota negara. Saat saya tinjau di lapangan, kondisinya memang sudah sangat tidak layak. Bangunan tahun 2010 dari CSR Pertamina ini, sebagian plafonnya-plafonnya sudah banyak yang ambruk akibat genteng bocor yang dibiarkan. Lantai jadi becek, bahkan sebagian lantai sudah tidak lagi berubin atau berkeramik, alias berlantai tanah. Sebagian ruang kelas sudah tidak lagi memiliki jendela karena kusen dan daun jendelanya dimakan rayap.

Meski pihak sekolah sudah mengajukan rehab ruang kelas, nyatanya sampai hari ini sekolah tersebut belum menikmati perbaikan yang diinginkan. Entah dimana mandeknya usulan ini, apakah political will pemerintahan Kabupaten Bekasi terhadap dunia pendidikan yang rendah atau ketiadaan dana untuk membangun.

SDN yang terletak di pinggir daerah persawahan penduduk ini, masih memiliki murid dari kelas 1 sampai kelas 6, sebanyak 233 siswa. Mereka tetap bersemangat belajar, terbukti dengan tingkat kehadiran yang tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh seorang guru kelas.

Saya berusaha untuk mengadvokasi dengan menyam-

paikan masalah ini ke Bupati dan teman-teman anggota DPRD kabupaten Bekasi, ke Gubernur Jawa Barat dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat atau ke kementerian.

Semoga para pemangku kepentingan, memiliki komitmen bersama untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang layak, untuk masa depan negeri ini yang lebih baik.

Jangan sampai menunggu anak-anak menjadi korban dahulu, baru ada perbaikan.

Semoga tidak terjadi.



**Semoga para pemangku kepentingan,
memiliki komitmen bersama untuk
membangun sarana dan prasarana
pendidikan yang layak, untuk masa
depan negeri ini yang lebih baik.**



BELAJAR DARI NU

Di hari yang baik ini, Jum'at, 31 Januari 2020, Nahdlatul Ulama (NU) sudah berusia 94 tahun. Hampir satu abad. Sebuah usia yang sangat panjang. Tak banyak organisasi masyarakat dan kegamaan memiliki rentang waktu sepanjang ini.

NU berdiri pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Hasil kesepakatan para kyiai di masa itu. Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar),

kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam *Khittah NU*, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Teramat banyak hal yang dapat kita pelajari dari NU. Terutama bagaimana caranya mengabdikan pada umat, bangsa dan negara. Jaringan pesantrennya tersebar luas hingga pelosok Tanah Air. Para kyai dan kadernya juga terus bergerak bersama masyarakat. Dan perjuangannya memerdekakan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negeri ini sudah tak terhitung.

Yang paling fenomenal adalah Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. PBNU mengundang konsul-konsul NU di seluruh Jawa dan Madura yang hadir pada tanggal 21 Oktober 1945 di kantor PB ANO (*Ansor Nahdlatul Oelama*) di Jl. Bubutan VI/2 Surabaya. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Besar KH Abdul Wahab Hasbullah, menetapkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama "Resolusi Jihad Fii Sabilillah", yang isinya sebagai berikut:

"Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe 'ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi

orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadajiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)..."

Dalam tempo singkat, Surabaya guncang oleh kabar seruan jihad dari PBNU ini. Dari masjid ke masjid dan dari musholla ke musholla tersiar seruan jihad yang dengan sukacita disambut penduduk Surabaya. Sejak dimaklumkan tanggal 22 Oktober 1945, Resolusi Jihad membakar semangat seluruh lapisan rakyat hingga pemimpin di Jawa Timur terutama di Surabaya, sehingga dengan tegas mereka berani menolak kehadiran Sekutu.

Saya sendiri dididik dan dibesarkan dalam lingkungan NU. Tepatnya di Pesantren Buntet, Cirebon. Saya teringat dengan kisah Mahaguru saya di Buntet, yaitu Gurunda Kiai Abbas, murid kesayangan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari. Beliau berpesan: Wahai Jiwa Kau Harus Turun Berlaga!"

Saat ini saya menjadi kader PKS. Perjuangan PKS dan NU sama yaitu menjaga Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, hanya lapangan kerjanya saja yang berbeda. NU lebih konsentrasi pada pendidikan keummatan, sedangkan PKS sebagai partai politik menyiapkan pejabat publik dan kebijakan publik yang pro keummatan. Pada titik inilah, PKS harus banyak belajar dari NU.

Selamat Hari Kelahiran NU. Semoga semakin maju dan terus berkarya untuk bangsa. Aamin.



KUNDAPIL: SATU HARI EMPAT LOKASI

Hari ini, Kamis (30/1) saya melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil). Dalam satu hari, ada empat titik lokasi sekaligus yang saya kunjungi.

Pertama, di Kantor Radar Bekasi, dari pukul 09.00 - 10.00 WIB. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat jurnalis Radar Bekasi. Bertukar pikiran, membahas isu-isu daerah dan nasional. Saya juga diajka ngeblog oleh mereka.

"Pak Ustadz Syaikhmu kelihatan lebih muda," ujar salah satu wartawan.

"Mungkin karena saya sekarang sering bertemu anak milenial," kata saya yjag disambut tawa mereka.

Media dan jurnalis adalah mitra strategis. Mereka merupakan pilar ke empat demokrasi. Menyuarakan kebenaran dan menyampaikan fakta. Sebab itu, mereka harus kita rangkul dan ajak bersinergi.

Agenda kedua di Karangligar, Karawang. Daerah ini mengalami banjir parah. Surutnya pun memakan waktu sekitar satu bulan. Saya datang untuk mendengarkan aspirasi warga dan memperjuangkannya.

Bersama saya, hadir pula Kepala Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Suwarno, Kepala Dinas Tata Ruang Kab. Karawang, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil dan sebagainya.

Warga meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan normalisasi Sungai Cibeet dan pembangunan pintu air. Insya Allah, dengan sinergi Pusat dan Daerah, aspirasi tersebut akan bisa diwujudkan.

Lokasi ketiga, saya bertemu dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Cari Majalaya dan Ciranggon, Karawang. Mereka mengeluhkan soal pengairan sawah yang bermasalah. Akibatnya, panen jadi berkurang

frekuensinya.

Terakhir, saya silaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Telagasari, Karawang. Pimpinan pondok KH Ali Muhammad menyampaikan kebutuhan ruang kelas baru. Sebab, ruang yang ada sudah tidak bisa menampung santri.

Lelah sudah pasti. Tapi itu sudah jadi kewajiban saya sebagai Wakil Rakyat. Jika bukan kepada Anggota DPR, kepada siapa lagi mereka menyampaikan harapannya.

Semoga Allah SWT memudahkan saya dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

Aamiin.



Warga meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan normalisasi Sungai Cibeet dan pembangunan pintu air. Insya Allah, dengan sinergi Pusat dan Daerah, aspirasi tersebut akan bisa diwujudkan.



MENERIMA DELEGASI TETO TAIWAN

Rabu, (5/2), saya menerima delegasi tamu dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka adalah Peter S. L. Lan dan David Wen-Chiun Lin. Keduanya termasuk pimpinan TETO, semacam Kamar Dagang Industri (Kadin) di Indonesia.

Banyak hal yang kami diskusikan. Terutama bagaimana membangun sinergi atau kerjasama untuk mengem-

bangkan daerah pemilihan saya di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Saya baru mengetahui, ternyata TETO sudah bekerjasama dengan petani di Karawang, melalui Pemkab setempat.

Ini tentu saja patut diapresiasi. Secara pribadi maupun sebagai anggota DPR, saya mengucapkan terimakasih kepada pihak TETO yang sudah mau bersinergi dan memajukan pertanian di Karawang.

Apa yang TETO lakukan sejalan dengan misi besar saya, yakni membangun kawasan terpadu pertanian. Namanya Asyik Farm. Karena itulah, saya menjelaskan mimpi saya tersebut kepada TETO.

Gayung bersambut. TETO siap bersinergi dan membantu mewujudkan misi tersebut. Mereka akan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Antara lain: pelatihan, manajemen, pembuatan irigasi, peternakan bebek hingga bibit unggul padi.

Hikmah orang muslim itu tercecceer dimana-mana. Selama itu masalah, maka kita harus mengambilnya. Pada konteks inilah kita harus memaknai rencana jalinan kerjasama tersebut.

Para petani kita harus diberikan ilmu, keahlian dan disejahterakan. Dengan kerjasama tersebut, mudah-mudahan para petani hidupnya akan jauh lebih baik.

DI JAYAPURA, SUARA IMAM MASJID BAGAI DI MASJIDIL HARAM

Sebuah kunjungan kerja (kunker) saya lakukan di awal tahun 2020 ini, paska reses. Kali ini saya berkunjung ke Papua. Provinsi paling timur di Indonesia.

Saya bermalam di Hotel Aston Jayapura. Di depan hotel ini terdapat pasar Mama Mama PAPUA, tempat masyarakat berjualan sayuran dan buah-buahan. Banyak dijumpai juga buah pinang, karena memang masyarakat Papua memiliki kebiasaan menginang.

Siang menjelang sore saya bergegas keluar hotel untuk mencari makan. Saya menanyakan ke petugas keamanan hotel, apakah ada rumah makan terdekat. Petugas keamanan hotel menunjukkan rimah makan Padang yang berada di sebelah kanan hotel. Langsung saja saya dan dan sahabat saya, Mas Bowo, bergegas menuju tempat yang ditunjuk. Memang betul, rumah makan itu tidak jauh dari hotel, mungkin hanya berjarak 10 meter saja.

Saat kami makan, terdengar suara adzan Ashar yang cukup nyaring. Saya menanyakan ke ibu pemilik rumah



makan, di manakah masjid yang terdekat? Ia menunjukkan, masjid yang berada di lingkungan kantor PLN Jayapura, sekitar 150 meter dari rumah makan. Saya bersepakat dengan Mas Bowo, besok pagi akan menunaikan Sholat Subuh di masjid PLN ini.

Keesokan harinya, sebagaimana kesepakatan, saat waktu subuh tiba kami langsung menuju masjid tersebut dengan berjalan kaki. Hitung-hitung sambil berolah raga. Di gerbang utama PLN nampak portal tertutup dan tidak ada petugas satpam. Kami berusaha mencari alternatif, apakah ada masjid lain terdekat.

Kami melihat ke arah utara, nampak kubah masjid besar berwarna hijau dan putih. Langsung saja kami menunjukan

langkah kaki kami ke masjid itu. Tak memakan waktu banyak untuk menuju Masjid itu karena hanya berjarak sekitar 250 meter saja dari kantor PLN.

Saat kami memasuki halaman masjid, masih terpampang spanduk tabligh akbar menyambut tahun baru 2020 dengan penceramah DR. Muhammad Syamsi Ali, Lc. MA sebagai Iman Besar di Islamic Centre of New York Amerika Serikat. Dalam hati saya, masjid ini pasti masjid yang makmur.

Betul saja ketika saya masuk ke ruang utama masjid, terasa sangat sejuk karena menggunakan pendingin ruangan. Jumlah jamaah yang ikut Sholat Subuh itu sekitar 200 orang. Kapasitas masjid berlantai dua itu mungkin bisa menampung jamaah sekitar 1.500 orang.

Saat Sholat Subuh berjamaah dilangsungkan, suara imam masjid yang masih muda ini sungguh sangat luar biasa, seperti suara Syekh Syuraim, sehingga kami merasa seolah sedang sholat di Masjidil Haram.

Keesokan harinya, kami pun mengulangi Sholat Subuh di masjid ini dan ternyata jamaahnya masih tetap sama dengan imam juga yang sama. Betapa nikmat saya merasakan sholat shubuh di Masjid Raya Baiturrahim Jayapura. Ya Allah, jadikanlah kami ahli masjid, yang tertambat hati kami di masjid, yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid-Mu. Aamiin.



FRAKSI PKS RESMI GULIRKAN PANSUS JIWASRAYA DAN INTERPELASI BPJS

Kabar menggembirakan hari ini terdengar dari Ruang Fraksi PKS di DPR, Jakarta. Para Anggota DPR RI dari PKS secara resmi menggulirkan pembentukan

Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya premi kelas III mandiri.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini inisiatif Fraksi ini berdasarkan aspirasi rakyat saat Reses DPR. Rakyat menginginkan agar DPR serius menyelidiki kasus Jiwasraya dan merespona keras kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri yang sangat memberatkan.

"Kita mendapat banyak aspirasi rakyat selama masa reses kemarin untuk membongkar kasus Jiwasraya yang bernilai triliunan, juga menangkap keberatan rakyat atas kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III mandiri. Dua kasus ini mengancam perekonomian dan merugikan negara serta masyarakat, khususnya rakyat kecil. Jika borok-borok ini dipelihara dia akan merongrong kesatuan republik Indonesia yang kita cintai ini," ungkapnya.

Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat. Berlandaskan aturan ini, kami berinisiatif melakukan langkah terobosan. Mengapa?

Jiwasraya memiliki potensi kerugian negara yang sangat besar, hingga mencapai Rp 13,7 Triliun. Ini jauh lebih besar dari Bank Century.

Jiwasraya masih memiliki utang dan liabilitas yang terus meningkat dimana di bulan September 2019 kewajibannya mencapai Rp. 49,6 Triliun. Ada sekitar 5,2 juta orang yang

terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Apalagi, ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini.

Kami mencium adanya indikasi fraud yang terorganisir (organized crime) dan kecurangan di balik kasus Jiwasraya sejak tahun 2013. Indikasi fraud yang berlangsung lama ini terkait dengan lemahnya pengawasan dari OJK dan Kementerian BUMN. Dengan demikian, kasus Jiwasraya bersifat kompleks dan multidisiplin.

Kami juga sangat menyayangkan adanya kenaikan iuran BPJS, khususnya pada premi kelas III Mandiri. Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI sudah sepakat tidak menaikkannya. Bahkan pemerintah mengusulkan tiga alternatif jika iuran tersebut naik. Namun, pemerintah malah mengingkari keputusan dan kesepakatan yang mereka buat dengan DPR. Kalau kita analogikan pakai lagu, kau yang memulai kau pula yang mengakhiri. Kenaikan itu tetap berlaku mulai 1 Januari 2020, termasuk untuk kelas III Mandiri.

Terkait Jiwasraya, saya pastikan akan all out mengawal kasus tersebut. Sebab ini juga masuk dalam ranah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Di sini, saya diamanahkan sebagai wakil ketua.

BPK sebagai mitra kerja BAKN telah memberikan laporan dan telaahnya terkait Jiwasraya. Insya Allah saya akan mengajak reka-rekan di BAKN mendorong kasus

ini untuk diselesaikan secara terbuka, transparan dan berkeadilan.

Doakan kami dari Fraksi PKS untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan memudahkannya. Aamiin.

KAMI ADALAH KELUARGA BESAR PKS

Hari Jumat (31/1), saya mengundang para pejuang PKS yang telah berjuang bersama PKS pada pemilihan umum 2019. Dari sembilan orang calon anggota DPR RI, hadir pada saat kemarin lima orang, sebagian yang tidak hadir ada yang sedang menjalankan tugas ke luar kota, sebagiannya sedang mendapat ujian sakit dari Allah SWT.

Caleg yang hadir ada yang hadir seorang diri, ada yang hadir bersama anak-anaknya dan ada juga yang membawa tim suksesnya.

Tentu saja saya yang terpilih dalam pemilihan umum 2019 dan sekarang diamanahi menjadi anggota DPR RI ingin



mengucapkan rasa terima kasih saya pada seluruh calon anggota legislatif DPR RI yang telah menyumbangkan suaranya dalam mengantarkan kursi DPR RI, dari yang mengumpulkan suara dalam jumlah ribuan, ada yang meraih puluhan ribu, bahkan ada juga yang hampir meraih seratus ribu suara.

Saya juga berharap, tokoh masyarakat ini menjadi simpul-simpul PKS pada masa yang akan datang. Ternyata gayung bersambut mereka juga ingin terus berjuang bersama PKS.

Kami bertekad pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih kongkret untuk memajukan daerah pemilihan Jawa Barat VII.

Bersama tokoh-tokoh PKS ini, saya juga bertekad untuk membangun daerah pemilihan yang meliputi Kabupaten Bekasi, kabupaten Karawang dan kabupaten Purwakarta bersama-sama di antaranya dengan membuat desa pertanian binaan. Semoga saja bisa terwujud segera.

LONGSOR DI PONPES FUTUHIYAT BANTEN

Saat saya mendampingi Ketua Majelis Syuro PKS ke lokasi banjir dan longsor di Banten, salah satu lokasi yang kami kunjungi adalah Pondok Pesantren Futuhiyah Banten.

Pada saat kami hadir di sana, sebagian halaman pesantren masih ditutupi lumpur tebal dan sedang dibersihkan menggunakan alat berat.

Memang pesantren Futuhiyah berada langsung di bawah bukit setinggi ratusan meter. Bukit itulah yang kemarin longsor menimpa pesantren.

Pada, 1 Januari 2020 lalu, pimpinan pondok pesantren Futuhiyah, Abuya KH. Qurthubi, selepas menunaikan sholat



subuh dan menyelesaikan wiridnya, merasakan kelelahan sehingga menyampaikan kepada istrinya untuk istirahat sejenak dan mohon dibangunkan jam 11.00. Namun, pada jam 09.00 istrinya membangunkan Abuya dan menginformasikan bahwa bukit dekat pesantren longsor.

Menerima informasi seperti itu, Abuya tidak langsung ke luar tetapi langsung ke kamar mandi, mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat, memohon bantuan Allah SWT. Ia teringat sahabat Rasul, Hudzaifah Ibnul Yaman, pada saat terjadi kebakaran besar yang dia tidak mampu berbuat apa-apa, ia langsung melaksanakan sholat memohon bantuan Allah SWT.

Abuya baru ke luar rumah sekitar jam 11.00 siang. Ia

merasa takjub, karena di tengah longsor bukit, murid-muridnya tidak merasa takut tertimpa longsor malahan mereka membawa pacul untuk membuat parit untuk mengalirkan tanah yang longsor.

Sungguh suatu yang menakjubkan, longsor itu tidak turun sekaligus tetapi mengalir seperti aliran sungai, tidak langsung menimpa pesantren tetapi mengarah ke samping pesantren mengikuti sungai yang dibuat oleh murid Abuya.

Allah tengah menunjukkan kekuasaan-Nya. Saat tidak ada lagi yang bisa diharapkan pertolongannya kecuali hanya pertolongan Allah. Saat daya dan upaya manusia tak lagi bermakna, hanya Allah satu-satunya tempat meminta. Apa yang sulit bagi kita, tak ada sulitnya bagi Allah.

Setelah sholat dzuhur berjamaah dan menikmati jamuan makan siang, kami pun pamit. Saat itulah kami menyaksikan kecintaan Abuya terhadap cucu Rasulullah SAW. Ia memohon izin kepada Habib Salim Segaf Aljufry untuk mencium keningnya. Habib pun mengizinkannya. Lalu kami pun pamit meninggalkan pesantren. Semoga dampak banjir dan longsor di pesantren segera dapat terselesaikan. Amin.



SKOUW, WILAYAH PERBATASAN YANG MEMBANGGAKAN

Hari ini Rabu, 15 Januari 2020. Saat kunjungan BAKN DPR RI ke Papua, saya menyempatkan diri untuk melihat perbatasan antara negara Indonesia dan Papua Nuginia, yaitu di daerah Skouw.

Perjalanan menuju Skouw dapat ditempuh dalam

waktu sekitar satu jam dari Jayapura, melewati Holtekamp Bridge atau yang biasa dikenal dengan "Jembatan Merah". Jembatan Merah ini masih baru, diresmikan pada tahun 2019 di era Presiden Jokowi. Sebelum Jembatan Merah dibangun, untuk menuju perbatasan biasa ditempuh dalam waktu sekitar dua setengah jam, karena harus mengelilingi teluk Kota Jayapura. Infrastruktur jalan menuju Skouw pun sangatlah mulus, yang dibangun sejak era Presiden SBY.

Sebelum memasuki check point di wilayah Indonesia, terlihat pasar tradisional yang sangat sederhana. Namun, di pasar ini transaksi masyarakat dua negara, Indonesia dan Papua Nugini (Papua New Guinea) berlangsung, khususnya pada hari-hari pasaran.

Memasuki check point, seorang anggota TNI yang berjaga -saat itu dari Batalyon Infanteri 713 Gorontalo- mendekati mobil dan langsung menanyakan tujuan ke perbatasan dan meminta sopir untuk meninggalkan KTP di pos penjagaan. Petugas yang menjaga di perbatasan berganti-ganti setiap 4 bulan.

Tak berapa lama, mobil kembali meluncur menuju tempat parkir. Kami pun langsung turun dan menuju gedung Kantor Imigrasi Indonesia yang megah. Di dalam Gedung Kantor Imigrasi suasana masih lengang, saya hanya menjumpai seorang petugas imigrasi. Saya sempat menanyakan ke petugas imigrasi mengapa kok kantornya

masih sepi? Ia menjawab karena hari itu bukanlah hari pasaran, di mana orang biasa melakukan transaksi di pasar Skouw.

Saya pun lanjut melihat ke wilayah Papua Nugini. Saya melihat perbedaan yang sangat mencolok. Di wilayah Papua Nugini nampak gedung-gedung tua yang sudah tidak terawat dengan baik, bahkan sebagian besar halamannya ditumbuhi dengan rumput yang sudah tinggi. Penjagaan pun hanya dilakukan oleh 2 orang tentara saja yang berpakaian dinas. Setelah pos penjagaan terdapat terminal dan beberapa lapak tempat jualan. Barang yang diperdagangkan di lima lapak yang buka ketika itu hampir sama yaitu kaos, topi, bola, kalung dan tas dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, umumnya hanya barang cinderamata untuk turis.

Spontan rasa bangga terhadap Papua dan NKRI tumbuh dalam diri. Betapa bangga punya bangunan yang megah, indah dan cukup terawat dan memiliki banyak spot untuk berfoto.

Langsung saya teringat dengan sahabat-sahabat komunitas saya; Pajero Owner Family (POF) dan Bike to Work karena saat saya ke Papua mengenakan seragam POF dan mengenakan topi "Bike to Work". Kalau saja mereka tahu spot seperti ini tentu mereka akan mengejar untuk mencapainya. Alangkah indahnya tempat seperti ini

digunakan untuk wisata, karena banyak spot-spot untuk bisa selfi. Rupanya sahabat saya yang menyetir mobil juga pencinta sepeda dan ia mengatakan memang jika hari libur banyak komunitas sepeda yang mendatangi tempat ini.

Pada saat pulang saya melihat ratusan biker dengan pengawalan polisi mendatangi tempat ini, nampaknya mereka akan mengadakan acara di wilayah perbatasan. Suatu hal yang membanggakan.

Saya sangat bersyukur, pemerintah telah membangun infrastruktur wilayah perbatasan di Skouw dengan baik dan membuat bangga bangsa Indonesia. Tinggal bagaimana kita menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya sehingga kebanggaan ini akan bisa juga dirasakan oleh anak cucu kita.



Saya sangat bersyukur, pemerintah telah membangun infrastruktur wilayah perbatasan di Skouw dengan baik dan membuat bangga bangsa Indonesia.



GUS SHOLAH, KAMI KEHILANGAN ENKKAU...

Hanya dua hari setelah Nahdlatul Ulama berusia 94 tahun, berita duka itu hadir. Dr. Ir. KH. Salahuddin Wahid wafat ketika umurnya menjejaki 77 tahun.

Kepergiannya membuat kita kehilangan sosok paripurna. Cucu KH. Hasyim Asy'ari itu bukan cuma ulama. Tapi

juga budayawan, penulis, aktivis kemanusiaan dan politisi yang berjiwa negarawan.

Karya tulisnya bertebaran. Selain menulis di media massa, almarhum juga melahirkan banyak buku. Di antaranya:

Negeri di Balik Kabut Sejarah (November 2001), Mendengar Suara Rakyat (September 2001), Menggagas Peran Politik NU (2002), Basmi Korupsi, Jihad Akbar Bangsa Indonesia (November 2003), Ikut Membangun Demokrasi, Pengalaman 55 Hari Menjadi Calon Wakil Presiden (November 2004).

Gus Sholah juga sosok ulama berintegritas. Mengatakan yang Haq itu Haq. Dan yang bathil adalah bathil. Tidak hitam putih.

Saat melihat Aksi 212 pada 2016 silam, Gus Sholah mengatakan bahwa umat Islam bukan lagi buih. Tapi sudah menunjukkan ketertiban, disiplin dan menjaga kebersihan.

Sebagai aktivis kemanusiaan, nuraninya tak tersekat batas-batas negara. Gus Sholah pernah mengirimkan bantuan untuk etnis Rohingya pada 2017. Kala itu, seperti dilansir Republika, beliau mempercayakan kepada PKS untuk menyalurkan bantuannya.

Kematian ulama mengingatkan kita pada Kitab Ash-Shahih. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu dari (hati) manusia

dengan mengangkatnya ke langit, tapi ia mencabut ilmu melalui kematian ulama. Hingga ketika tidak lagi ada seorang alim pun, orang-orang mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Mereka kemudian ditanya lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka pun tersesat dan menyesatkan," (HR. Bukhari (I/100), Muslim (IV/kitab; ilmu hadis nomor 13), At Tirmidzi (V/2652), Ibnu Majah (I/52), Ahmad (II/hal: 162).

Gus Sholah, bukan hanya NU yang kehilangan salah satu putra terbaiknya. Tapi juga umat dan bangsa ini.

Kami kehilangan engkau...

Allahummaghfirlahu Warhamhu Wa'afih Wa'fu'anh.



Sebagai aktivis kemanusiaan, nuraninya tak tersekat batas-batas negara. Gus Sholah pernah mengirimkan bantuan untuk etnis Rohingya pada 2017. Kala itu, seperti dilansir Republika, beliau mempercayakan kepada PKS untuk menyalurkan bantuannya.



ALHAMDULILLAH, GEDUNG SDN 04 SAMUDRAJAYA AKHIRNYA DIPERBAIKI

Kabar gembira itu akhirnya datang juga. Senin, (3/2) kemarin, sudah ada kepastian perbaikan Gedung SDN 04 Samudrajaya, Tarumajaya yang rusak parah

dan videonya viral di media sosial.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang memastikan itu, saat hadir dalam Musrenbang Kecamatan Tarumajaya. Bupati menyampaikan akan segera memperbaiki gedung tersebut agar anak-anak nyaman belajar.

Tiga hari sebelum Bupati Eka memastikan perbaikan, saya bertemu dengan beliau, Jum'at (31/1). Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan secara langsung soal kondisi SDN 04 tersebut dan meminta harus cepat diperbaiki.

Saya menyampaikan itu karena sudah berjanji kepada pihak sekolah dan murid-murid SDN 04 Samudrajaya. Janji itu saya ucapkan ketika berkunjung pada Selasa, 21 Januari lalu.

Kala itu, saya sengaja datang ke lokasi setelah video kerusakan parah SDN viral di media sosial. Saya menyaksikan sendiri betapa memprihatinkan keadaannya. Atap gedung yang bolong dan bocor, lantai yang banyak beralaskan tanah, juga tembok yang mengelupas. Sungguh sangat tidak layak untuk belajar mengajar.

Sebagai Wakil Rakyat, sudah jadi kewajiban saya untuk mengadvokasi masalah ini. Saya datang, mendengar dan menyerap aspirasi lalu memperjuangkannya.

Alhamdulillah, dengan sinergi semua pihak, masalah ini insya Allah akan segera tuntas. Apresiasi saya berikan

kepada pihak Pemkab Bekasi yang cepat merespons persoalan ini.

Semoga masalah-masalah lain di Kabupaten Bekasi juga terselesaikan. Kuncinya adalah kerjasama semua pihak terkait. Agar masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan kita sebagai pemangku kebijakan.

Aamiin.

BELAJAR TANI KE PAK HERI DI SUKOHARJO

Sebuah kunjungan tak biasa saya lakukan pada Jum'at (14/2). Saya mengajak 16 orang Tim Asyikpreneur untuk belajar tani ke Pak Heri di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kami berangkat dari Kantor Asyikpreneur pada Rabu malam. Sengaja lebih awal karena ingin sekalian silaturahmi kepada warga Kota Bekasi yang baru sekitar 10 bulan menjabat Kepala Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Namanya Bapak H. Ahmad Suparyadi, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai



Ketua LPM Jakasampurna Bekasi Barat.

Seharian penuh kami bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan Pak Lurah dan masyarakat desa Menjing, pada Kamis, 13 Februari.

Baru pada keesokan harinya, Tim Asyikpreneur mengunjungi sebuah lokasi pertanian yang dikenal dengan nama Integrated Farm di Sukoharjo milik inspirator Ir. Heri. Tempat ini kami pilih karena memang Pak Heri berhasil melakukan perubahan pola tani di lahan kering.

Sebagian masyarakat Sukoharjo memanfaatkan lahan pertaniannya hanya satu kali dalam setahun. Selebihnya tanah tidak dapat diolah bahkan pecah-pecah karena ketiadaan air.

Heri tergelitik dan ingin melakukan perubahan. Sarjana lulusan teknik ITB ini akhirnya memutuskan untuk membuat sumur dalam dengan kedalaman sekitar 60 hingga 80 meter untuk mengairi sawah seluas 2 hektar.

Dengan sangat akrab dan terbuka, penggagas *integrated farm* ini menguraikan berbagai hal terkait proses dan perencanaan serta teknik bagaimana *integrated farm* tersebut dilaksanakan. Heri memadukan peternakan, perikanan dan pertanian dalam satu wilayah atau area, sehingga seluruh kegiatan terkontrol dan terpadu di lahan seluas 2 ha, tanpa menyisakan lahan kosong yang tidak menghasilkan dan tidak berdaya guna.

Heri mengintegrasikan seluruh kegiatan dengan mengelola air secara efektif, untuk keperluan perikanan, peternakan, dan pertanian. Pertama kali air dipompa ke bak-bak penampungan yang berisi bibit ikan lele yang diletakkan lebih tinggi dari lahan pertanian. Tujuannya tidak lain untuk memanfaatkan air sesuai gravitasi. Tanpa alat pompa, air mengalir secara alamiah dari kolam penampungan yang lebih tinggi ke saluran minto tani sambil membawa limbah kotoran lele. Di saluran minto tani inilah dicampurkan kotoran sapi dan hasil pembakaran jerami dan kotoran ayam sekaligus untuk menambah unsur P dan K yang diperlukan untuk lahan pertanian. Di kolam ini dipelihara juga ikan dengan jumlah yang tidak

terlalu banyak. Dari kolam inilah air dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.

Bak penampungan sebanyak 65 buah digunakan untuk beternak lele. Setiap bak berisi 3.500 - 4.500 ekor lele.

Dengan manajemen air yang baik ini, Heri bisa menanam padi selama empat kali dalam setahun. Padi yang dihasilkan pun sangatlah baik, mengingat asupan air yang mengandung nutrisi N, P dan K yang memadai. Produktivitas sawahnya pun sangat bagus dengan menghasilkan 9 - 11 ton gabah per hektarnya.

Heri juga memanfaatkan saluran mina tani dengan menanam bawang di atas saluran tersebut, semacam hidrokuinon.

Apa yang dipelajari dan diserap oleh Tim Asyikpreneur ini dalam rangka mewujudkan Integrated Asyik Farming di Karawang Jawa Barat dalam Semoga bisa terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Heri, yang sudah membawakan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami.



AGAMA DAN PANCASILA SATU TARIKAN NAFAS

Di parlemen, selain sebagai Anggota DPR di Komisi V dan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), saya juga diamanahi sebagai anggota Badan Pengkajian (BP) MPR oleh Fraksi PKS. Tugas utamanya melakukan kajian dan sosialisasi 4 Pilar

MPR, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Karena itu, saya sungguh terkejut ketika mendengar adanya pernyataan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Mengapa? Sebab selama 5 bulan menjadi anggota BP MPR, saya melihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat saat berdiskusi keempat pilar MPR di atas. Dan notabene, masyarakat yang saya temui adalah orang-orang beragama.

Saya bertemu mereka di dapil saya, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Saat sesi tanya jawab, mereka terlihat semangat ketika bicara soal lima sila Pancasila. Bahkan mereka memberikan saran dan masukan terkait hal-hal yang menyangkut 4 Pilar MPR.

Tak ada sama sekali sikap dan perilaku yang memperlihatkan mereka anti Pancasila. Mereka tak memusuhi Pancasila. Mereka justru sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi final bangsa ini. Tak bisa diganggu gugat.

Sejatinya, memang demikian adanya. Pancasila dan agama tak bisa dipisahkan. Tidak bisa didikotomikan. Apalagi bermusuhan. Sebab keduanya satu tarikan nafas.

Simaklah apa yang disampaikan oleh Mohamad Natsir. Dengan nada retorik, Natsir bertanya saat berpidato pada acara Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Mei 1973. Tanya Natsir:

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang memancarkan tauhid dapat apriori (bertentangan) dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan 'ijtima'iyah bisa apriori (bertentangan) dengan keadilan sosial?

Bagaimanana mungkin ajaran al-Qur'an yang justru memberantas feodal dan pemerintahan sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, dapat apriori (bertentangan) dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat?

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang menegakkan istilah islahu bainan naas sebagai dasar-dasar pokok yang harus ditegakkan umat Islam, dapat apriori (bertentangan) dengan apa yang disebut Perikemanusiaan?

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, dapat apriori (bertentangan) dengan Kebangsaan?

Jadi, sungguh tak benar jika ada yang berkesimpulan agama adalah musuh Pancasila. Pernyataan tersebut ahistoris dan melukai rakyat Indonesia yang religius.

Semoga negeri ini tetap bersatu dalam naungan Pancasila dan NKRI. Karena keduanya harga mati. Aamiin.

...



**SDN 04 Samudrajaya :
Viral, Dikunjungi Syaikh, Dikusul Bupati Bekasi dan Diperbaiki**

Saya mengapresiasi Bupati, Responsnya cepat. Terimakasih sudah bersama-sama mengatasi masalah ini!

H. Ahmad Syaikh
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Barat VII



Ahmad Syaikh saat memimpin Komite Sekolah SDN Samudra Jaya 04 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.

Fraksi PKS DPR RI | @ahmad_syaikh | @ahmad_syaikh | @ahmad_syaikh

Rilis Media



TOL CIPALI KM 136 BANJIR, AHMAD SYAIKHU BERIKAN TIGA REKOMENDASI

Banjir yang melanda Tol Cipali KM 136 mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI Komisi V Ahmad Syaikh. Politisi PKS itu memberikan tiga rekomendasi kepada PT Lintas Marga Sedaya (LMS) sebagai pengelola jalan tol.

Menurut Ahmad Syaikh, penyebab utama terjadinya banjir karena curah hujan yang tinggi. Memasuki musim penghujan tahun ini, potensi kembali terjadinya banjir sangat besar. Karena itu, Syaikh meminta LMS melakukan tiga hal.

"Ini baru memasuki musim penghujan. Artinya, potensi terjadinya banjir lagi di ruas tol akan sangat besar. Pihak LMS harus segera melakukan tiga hal," ujar Syaikhu yang berasal dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kab. Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu.

Pertama, kata Syaikhu, perlu adanya Petugas khusus cepat tanggap dari pengelola tol jika mengalami curah hujan yang tidak normal. Mereka dibekali dengan peralatan semacam pompa dan lainnya guna menghilangkan genangan air dengan cepat.

Kedua,antisipasi kemacetan dengan pembatasan intensitas kendaraan masuk tol

Dan ketiga, amdal juga harus memperhatikan drainase akibat pengalihan tata guna lahan dan ruang.

"Dengan melakukan tiga hal ini, insya Allah persoalan banjir di Tol Cipali akan bisa teratasi," tegas Syaikhu.

Banjir terjadi pada Selasa 31 Desember 2019 yang mengakibatkan ruas jalan KM 136 arah Jakarta dan Bandung atau sekitar wilayah Cikedung, Indramayu tergenang air dengan ketinggian 15-20 cm dan panjang sekitar 200 meter.

Selain akibat dari curah hujan yang cukup tinggi, genangan ini diduga berasal dari kiriman air dari luar jalan tol.

Genangan air terjadi sejak pukul 17.00 WIB, melalui lajur 2 atau lajur tengah.

LMS berkilah sudah membangun drainase sesuai

dengan Detailed Engineering Design (DED) yang telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan kondisi setempat pada saat itu dan menjamin semua air di sepanjang ruas tol selalu dipelihara secara rutin baik pembersihan maupun perbaikan yang diperlukan.

Sistem drainase yang ada di jalan tol hanya berfungsi sebagai saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan dan air yang berasal dari permukaan badan jalan tol. Jadi tidak berfungsi untuk menampung air akibat adanya perubahan tata guna lahan dan tata ruang sekitar jalan tol.

AHMAD SYAIKHU BERIKAN BANTUAN KE KORBAN BANJIR DI KABUPATEN BEKASI

Anggota DPR RI dari Ahmad Syaikhun mengunjungi tiga lokasi banjir di Kabupaten Bekasi, Kamis (2/01/2020). Politisi PKS itu juga memberikan bantuan kepada korban banjir.

Syaikhun meninjau lokasi banjir di Perumahan Tridaya dan Papan Mas Tambun Selatan serta Perumahan Trias Cibitung. Ketiga lokasi tersebut terkena banjir cukup parah. Ketinggian air mencapai hampir sedada orang dewasa.

"Ini semua musibah. Ujian dari Allah. Saatnya kita



bergandengan tangan menolong saudara-saudara kita yang jadi korban," ujar Syaikhu yang berasal dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Syaikhu berdialog dengan warga dan mengunjungi dapur umum.

"Terimakasih Pak Syaikhu atas kunjungan dan bantuannya," kata Tarmuji, warga Perumahan Trias.

Selain mengunjungi korban banjir, Syaikhu juga memberikan bantuan logistik.

"Bantuan ini tak seberapa dibandingkan dengan penderitaan warga. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit meringankan," pungkas Syaikhu.

PROYEK KERETA CEPAT JADI PENYEBAB BANJIR TOL JAPEK, AHMAD SYAIKHU PERTANYAKAN AMDAL



Banjir yang melanda Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 24 ternyata disebabkan oleh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhul mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut.

"Ini berarti ada yang tidak beres dengan proses terbitnya amdal. Jika andalnya benar maka tidak akan terjadi banjir di jalan tol," ujar Syaikhul.

Anggota Komisi V itu meminta pihakpihak terkait untuk meninjau ulang Amdal dimaksud dan melakukan langkah-langkah antisipasi agar banjir tak lagi terjadi.

"Amdal tersebut harus dievaluasi dan dikaji ulang. Pihak Kemenhub juga harus segera melakukan langkah-langkah antisipasi agar banjir tak terulang," tegas Syaikh.

Syaikh juga mengingatkan, amdal harus dilakukan sepanjang jalur kereta cepat. Bukan hanya parsial atau pada wilayah tertentu. Syaikh mengingatkan insiden meledaknya pipa gas Pertamina di Cimahi, Jawa Barat yang berada di jalur kereta cepat.

"Amdal harus menyeluruh. Dilakukan sepanjang jalur kereta cepat," katanya.

Menurut Syaikh, Amdal harus jadi perhatian bersama dan syarat penting dalam membangun proyek infrastruktur. Karena itu, dia menyayangkan rencana penghapusan Amdal oleh pemerintah

"Sangat disayang jika Amdal dihapus. Padahal Amdal jadi syarat layak atau tidaknya sebuah proyek infrastruktur," ungkapnya.

Sebagai diberitakan, Ditjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020) menegaskan bahwa banjir di Tol Japek disebabkan gorong-gorong yang tersumbat.

"Kita langsung rapat koordinasi untuk melihat apa faktor penyebabnya di sana gorong-gorong yang

tersumbat, kemudian ada jalan air yang di pintu tol begitu saja, dan kemudian sudah pembagian pembicaraan. KCIC menjalankan apa, Waskita apa, Jasa Marga apa," katanya.

Saat wartawan bertanya penyebab banjir, Budi lantas menjawab tegas kereta cepat.

"Kereta cepat, kereta cepat," tegas Budi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri sudah mendapatkan izin atas Amdal pada 20 Januari 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah telah menerbitkan izin atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung pada 20 Januari 2016 lalu. Namun penerbitan amdal tersebut mendapat kritikan dari Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan. Dia menyangsikan atas penerbitan surat keputusan kelayakan Amdal kereta cepat oleh pemerintah.

Dadan menjelaskan Amdal terkesan terburu-buru sebab tim teknis Amdal baru dibuat pada Desember 2015.

Sementara keputusan dikeluarkan pada pertengahan Januari 2016. Hal ini berarti kajian atas Amdal dilakukan hanya sebulan saja. Padahal, idealnya kajian Amdal minimal dilakukan dalam enam bulan. Selain itu, pembuatan Amdal tidak melibatkan warga yang terkena dampak langsung proyek.



AHMAD SYAIKHU DESAK PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DUDUK BERSAMA ATASI BANJIR

Banjir di Jabodetabek menelan korban jiwa dan harta benda yang tak sedikit. Banyak pihak menganggap ini terjadi karena upaya pencegahan banjir oleh pemerintah belum optimal. Itu dapat dilihat dari belum tuntasnya rencana strategis menanggulangi banjir yang sudah disusun sejak lama, seperti Sodetan Ciliwung.

Menyikapi ini, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikh meminta pemerintah pusat dan daerah kembali

duduk bersama agar persoalan banjir bisa teratasi.

Menurut Syaikh yang diamanahi di Komisi V DPR, banjir memang tidak dapat dihindari. Apalagi jika curah hujan sangat tinggi dan durasinya lama seperti yang terjadi pada 1 Januari lalu. Tapi pemerintah dapat meminimalisir jika bisa terus berkomunikasi dan duduk bersama pemerintah daerah.

Syaikh menyinggung soal perdebatan di ruang publik antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keduanya berselisih pendapat soal penanganan banjir. Basuki menggunakan konsep normalisasi, sedangkan Anies memakai istilah naturalisasi.

"Ini tidak elok. Saat masyarakat terkena banjir, yang muncul justru perdebatan yang tidak perlu. Seharusnya Pusat dan Daerah duduk bersama," ujar Syaikh.

Syaikh menyoroti proyek Sodetan Ciliwung yang membutuhkan kerjasama Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta. Sodetan Ciliwung merupakan proyek penangkal banjir yang digagas saat Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 2012. Sodetan ini menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur (BKT).

Proyek ini diharapkan mampu mengalirkan air sungai Ciliwung ke BKT. Bila sodetan ini beroperasi, beban di Pintu Air Manggarai dapat dikurangi. Namun, proyek ini tersendat

karena pembebasan lahan. Hingga kini dari 1,2 km sodetan yang mau dibangun, baru selesai 600 m.

Menurut Basuki, pihaknya masih menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembebasan lahan proyek. Basuki menjelaskan 600 m proyek yang selesai sudah mandek sejak tahun lalu tanpa pengerjaan lanjutan.

"Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi kalau komunikasi antara Pusat dan daerah intensif dilakukan," kata Syaikhu.

Syaikhu juga menyoroti penanganan banjir oleh pemerintah yang masih belum maksimal. Soal perahu karet, misalnya. Dia melihat masih sangat minim.

"Saya banyak dapat pesan dari masyarakat untuk meminta bantuan perahu karet. Karena mereka terjebak banjir dan belum ada bantuan yang datang dari aparat pemerintah," ungkap Syaikhu.

Perahu karet ini harus jadi prioritas. Sebab skala banjir setiap tahun cenderung meningkat dan meluas. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaannya.

"Pengadaan perahu karet itu salah satu langkah antisipatif yang bisa kita lakukan. Harus dialokasikan anggarannya," pungkas Syaikhu.

Berdasarkan data BNPB, ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten.



SUREL BOCOR, AHMAD SYAIKHU: PEMERINTAH HARUS DUKUNG GUGATAN KELUARGA KORBAN LION AIR JT 610 KEPADA BOEING

Bocornya Surat Elektronik (surel) pegawai Boeing ke publik mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI dari F-PKS Ahmad Syaikh. Menurutnya, dengan bukti ini, pemerintah harus secara optimal mendukung keluarga korban Lion Air JT 610 menggugat Boeing dan FAA (Otoritas Penerbangan AS).

"Ini jelas jadi bukti baru dan semakin menguatkan alasan agar pemerintah secara optimal mendukung keluarga korban menggugat Boeing dan FAA," ujar Syaikh.

Bagi Syaikh yang duduk di Komisi V itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, wajib menjadikan peristiwa tersebut sebagai bekal untuk membela kepentingan WNI.

"Iya, ini bisa jadi bekal membela kepentingan WNI kita. Ingat korban terbesar jatuhnya Lion Air JT 610 adalah rakyat Indonesia," ungkap Syaikh.

Dukungan pemerintah harus dilakukan karena Boeing dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya memberikan prosedur dan panduan penerbangan. Sedangkan FAA dianggap lalai sebagai regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat. Sebab mereka memberi sertifikasi terbang untuk produk pesawat terbang yang tidak memberikan informasi detil mengenai kondisi mesin pesawat.

Dalam surel yang bocor ke publik, terungkap bobroknya mesin pesawat yang berujung diragukannya keselamatan jika dipaksa terbang.

Dalam pandangan Syaikh, ada tiga hal lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait fakta mengejutkan tersebut.

Pertama, Pemerintah meminta pihak Amerika untuk investigasi secara lebih mendalam terkait isi surel tersebut,

agar menjadi dasar hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Boeing dan memungkinkan FAA lalai dalam proses pemeriksaan.

Kedua, mendorong pemerintah untuk tetap tidak mengizinkan operasi pesawat Boeing 737 Max di wilayah udara Indonesia hingga selesai solusi atas desain pesawat, kelengkapan sertifikasi dan panduan (sesuai rekomendasi KNKT).

Ketiga, Pihak Indonesia siap menjadi bagian dalam investigasi karena salah satu korban terbesar akibat kelalaian pihak Boeing.

KUNJUNGI SDN 04 SAMUDRAJAYA, AHMAD SYAIKHU: JANGAN TUNGGU ADA KORBAN BARU DIPERBAIKI

Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu meninjau langsung SDN 04 Samudrajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang rusak parah, Selasa (21/1). Politisi PKS itu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi segera memperbaikinya sebelum jatuh korban.

Syaikhu mengingatkan ini karena melihat kondisi bangunan yang sudah sangat tidak layak.



“Jangan sampai ada korban baru kemudian diperbaiki. Anak-anak juga tidak nyaman belajar,” ujar Syaikhu yang berasal dari Dapil Jabar VII (Kab. Bekasi, Karawang dan Purwakarta).

Syaikhu melanjutkan, perbaikan bangunan sekolah ini harus jadi prioritas. Semua pihak terkait diminta untuk menangani masalah ini secepatnya.

Syaikhu sendiri akan berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Bekasi dan Anggota DPRD nya. Juga dengan Gubernur Jawa Barat dan Anggota DPRD Provinsinya.

“Saya akan mengadvokasi ini dan berkomunikasi dengan semua pihak. Agar segera tuntas,” kata Syaikhu.

Seperti diketahui, video kerusakan parah SDN 04 Samudrajaya, Tarumajaya viral di media sosial. Dalam

tayangan tersebut, kondisinya terlihat sangat parah. Plafon-plafon banyak yang bolong, lantai banyak yang beralaskan tanah. Kondisi bangunan juga terlihat ringkih.



SYAIKHU: PERLU KAJIAN KHUSUS DANA OTSUS

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam terkait kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana

Keistimewaan yang digelontorkan negara kepada Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga Pemerintah bisa betul-betul mengambil sikap melanjutkan atau menghentikan dana Otsus.

"Memang ada rasionalitas dan ada kelemahannya. Di sinilah kita harus mencari jalan keluar terbaik dengan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita berharap dalam pembahasan ini kita libatkan para Guru Besar yang melakukan kajian-kajian, khususnya terkait dengan bagaimana pola distribusi keuangan negara ini ," kata Syaikhu usai mendengarkan masukan-masukan dari Profesor dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1/2020).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika Papua tak mendapat dana Otsus, maka akan kesulitan untuk membangun infrastruktur, mensejahterakan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, saat ini pihaknya sedang mencari formulasi dari dana yang bisa disediakan Pemerintah, dari sejumlah kementerian yang bersangkutan. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bidang infrastruktur.

Syaikhu menambahkan, pertemuan ini dalam rangka

percepatan pelaksanaan Otsus di masing-masing daerah, sehingga otonomi tidak memunculkan sikap egosentris kedaerahan.

"Saya sampaikan kepada Profesor dan Guru Besar, apakah memungkinkan jika sekiranya ada mandatori dari undang-undang bahwa satu daerah itu bisa dilakukan *sister provinces* dengan daerah lain. Misalnya DKI Jakarta dari sisi keuangan memang punya banyak kemampuan, tetapi wilayahnya kecil. Apakah itu bisa kemudian di-*sisterprovinces*-kan dengan Papua. Sehingga akan ada pemerataan di setiap daerah satu sama lain akan lebih cepat," jelasnya.

ADA KETIDAKADILAN, AHMAD SYAIKHU: TUNDA KENAIKAN TARIF JALAN TOL

Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol mendapat tanggapan dari Anggota Komisi V F-PKS Ahmad Syaikh. Menurutnya, ada ketidakadilan terkait kebijakan tersebut, sehingga kenaikan tersebut harus ditunda.

Syaikh menyoroti besaran kenaikan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1231/KPTS /M/2019. Berdasarkan



ini, kenaikan tarif tol akan berdampak pada pengusaha kecil dan menengah (UMKM).

“Ini tidak adil. Kenaikan tarif tol harus ditunda karena yang terkena dampak paling besar adalah UMKM,” kata Syaikhu.

Merujuk pada Kepmen PUPR di atas, tarif tol mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan dan ada penyesuaian tarif, yakni:

1. Golongan I : Rp.10.000,-
2. Golongan II (2019) : Rp. 15.000,-
3. Golongan III (2019): Rp. 17.000,-

Tarif Golongan II (2017) mengalami kenaikan hingga

30,43% sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan. Padahal, pemilik kendaraan jenis ini di dominasi oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM).

Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV (2017) dan V (2017) (sekarang menjadi Golongan III (2019)) yang mayoritas dimiliki oleh korporasi.

Terakhir tarif tol ini mengalami kenaikan pada Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan tarif yang lalu, maka golongan I mengalami kenaikan sebesar 5,26%, Golongan II (2017) naik sebesar 30,43%, Golongan III (2017) turun sebesar 3,22% (sekarang menjadi Golongan II (2019)), Golongan IV (2017) turun sebesar 10,52% (sekarang menjadi Golongan III (2019)), Golongan V (2017) turun sebesar 26,09% (sekarang menjadi Golongan III (2019)).

Sesuai aturan yang tercantum dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan 2 tahun sekali. Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan memberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota baru untuk ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Selain tidak adil terhadap pengguna jalan tol Golongan II (2017), Syaikh juga mengkritisi kenaikan yang mencapai 30,43%. Sebab, itu melanggar Pasal 68 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Jika tetap dinaikkan, pemerintah harus tetap berpedoman kepada Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pasal 67 dimana penyesuaian tarif tol harus ditetapkan berdasarkan laju inflasi. Dan juga memastikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terpenuhi dengan memperhatikan kepuasan pelanggan pengguna tol.

Berdasarkan inflasi 2018 dan 2019, dengan asumsi SPM terpenuhi, maka seharusnya kenaikan tidak melebihi 4% dari tarif sebelumnya. Sesuai Pasal 48 ayat (1), Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

“Melihat segala persoalan di atas, Ditambah daya beli masyarakat yang masih lemah, pemerintah sudah seharusnya menunda kenaikan tarif jalan tol,” pungkas Syaikh yang berasal dari Dapil VII Jabar yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

RESPONS ASPIRASI APBMI, AHMAD SYAIKHU DESAK PEMANGGILAN MENTERI PERHUBUNGAN



Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu mendesak rekan-rekannya di Komisi V DPR segera memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pemanggilan itu terkait dengan keluhan yang disampaikan Perusahaan bongkar muat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI di Gedung Parlemen, Rabu (29/1), APBMI mengeluarkan Permenhub 152/2016 tentang Penyelenggaraan

dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal yang dinilai telah mengancam eksistensi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan.

"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah DPR segera memanggil Menteri Perhubungan untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Syaikh dalam RDP tersebut.

Menurut Syaikh, aspirasi APBMI sangat mendesak ditindaklanjuti karena selain mengancam keberadaan mereka juga hal ini sejak tahun 2016 belum terselesaikan. Syaikh juga melihat pentingnya pemanggilan tersebut untuk mensinkronisasikan peraturan yang ada, antara peraturan kepelabuhanan dan peraturan pelayaran.

"Ini ada peraturan yang bertolak belakang. Harus segera panggil Menhub untuk mensinkronisasikan agar usaha rakyat tidak jadi korban," kata Syaikh.

Dalam RDP tersebut, APBMI menyampaikan soal Permenhub No.152 tahun 2016 yang mengakibatkan anak perusahaan Pelindo mengambil alih usaha bongkar muat yang telah banyak dikerjakan oleh pihak swasta.

Ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dimana pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu (PBMI) dan perusahaan angkutan laut nasional, tidak termasuk BUP (Badan Usaha Pelabuhan).

BERTEMU BUPATI BEKASI, AHMAD SYAIKHU MINTA SDN SAMUDRAJAYA 04 SEGERA DIPERBAIKI

Ahmad Syaikhul meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja segera memperbaiki Gedung SDN 04 Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya yang sudah tidak layak.

Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhul saat bertemu dengan Bupati Eka, Jum'at (31/1) di Kantor Pemkab Bekasi, Cikarang.

"Tolong Pak Bupati segera diperbaiki. Kondisinya sudah sangat tidak layak," ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS itu.

Menanggapi permintaan Syaikhul, Bupati Eka menyatakan kesiapannya.

"Sesegera mungkin akan dilakukan," jawab Eka.

Syaikhul sendiri sudah meninjau langsung SDN 04 Samudrajaya tersebut. Kondisinya memang sangat memprihatinkan.

Atap bangunan sudah banyak yang bolong. Lantai ruang kelas juga banyak yang beralaskan tanah. Belum lagi jika banjir datang, kondisi sekolah semakin rusak.

"Saya berharap SDN 04 segera diperbaiki. Agar guru dan siswa nyaman dan aman belajar," pungkas Syaikhul.

SDN 04 SAMUDRAJAYA: VIRAL, DIKUNJUNGI SYAIKHU, DISUSUL BUPATI BEKASI DAN DIPERBAIKI



Sekolah SDN Samudrajaya 4 di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi akhirnya diperbaiki. Sekolah ini sempat viral di media sosial, setelah siswa di sekolah itu membuat video meminta bantuan akibat sekolahnya rusak parah, atapnya jebol, ubinnya mengelupas, dan sebagian tanpa jendela.

Perbaikan dimulai sejak pekan ini setelah Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menengok langsung kondisi sekolah tersebut. Di sela kunjungannya itu, Eka memerintahkan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang segera melakukan perbaikan. Oleh karena itu, sejak kemarin atap sekolah dilakukan perbaikan.

Jauh sebelum Eka turun ke lapangan, lebih dulu Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhul Meninjau ke lokasi, setelah beberapa hari video viral di media sosial. Syaikhul mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan. Dia pun berjanji akan menyampaikan kondisi parah SDN 04 Samudrajaya kepada Bupati Bekasi Eka.

Janji itu ditepati. Syaikhul bertemu Bupati Bekasi di kantornya, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi di Delta Mas, pekan lalu. Syaikhul meminta pemerintah segera turun tangan.

"Tolong Pak Bupati, SDN 04 Samudrajaya segera diperbaiki," pinta Syaikhul.

"Sesegera mungkin diperbaiki," jawab Bupati Eka.

Dan janji itu ditepati pula oleh Bupati. Syaikhul mengapresiasi respons cepat Bupati.

"Saya mengapresiasi Bupati. Responsnya cepat. Terima kasih sudah bersama-sama mengatasi masalah ini," ujar Syaikhul.



SYAIKHU AJAK MAHASISWI HIDUPKAN TRADISI LITERASI

Pada Kamis (27/2), se usai rapat paripurna penutupan masa sidang II 2019/2020, Ahmad Syaikhul menerima kunjungan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah Bekasi.

Rombongan mahasiswi sebanyak 20 orang tersebut diterima di ruang rapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lantai 3 gedung Nusantara I.

Rombongan ini dalam rangka melakukan studi lapangan, mendalami praktek perpolitikan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Syaikhul mengingatkan agar mahasiswi harus menjadi agent of change (agen peru-

bahan) di tengah masyarakat. Perubahan itu bisa dimulai dari yang kecil menghidupkan tradisi literasi.

Syaikhu mencontohkan bahwa dirinya mulai mencoba menulis hal-hal kecil, yang mungkin dianggap sepele. Apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan bahwa dirinya sejak masuk DPR RI membiasakan untuk menulis kejadian-kejadian yang ia alami. Alhamdulillah Rabbil alamin tulisan itu sekarang terangkai dalam buku Catatan Harian Ahmad Syaikhu 1.

Dalam kesempatan ini juga Syaikhu menghadiahi lima buah buku karyanya kepada pimpinan rombongan dan para mahasiswi yang aktif bertanya dalam diskusi interaktif.

Dengan membiasakan menghidupkan tradisi literasi, Syaikhu berharap mahasiswi akan memiliki sensitivitas atau kepekaan dalam melihat realitas kehidupan.

Syaikhu juga berharap agar para mahasiswi tersebut tidak berhenti pada berkumpul saja dan terserak ibarat mendorong mobil mogok. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan berhimpun dan terorganisir dengan baik di semua sektor kehidupan.

Semoga para mahasiswi yang datang pada hari ini akan menjadi agen perubahan dalam berbagai sektor kehidupan di negeri kita pada masa-masa yang akan datang. Amin.

AHMAD SYAIKHU: ADA 8 LANGKAH JADIKAN KABUPATEN BEKASI, KARAWANG, PURWAKARTA TETAP LUMBUNG PADI NASIONAL

Adanya pelambatan hasil produksi padi di Kabupaten Karawang dan wilayah sekitarnya mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Ahmad Syaikh. Politisi PKS itu pun memberikan 8 langkah untuk mengatasi hal ini.

Syaikh yang berasal dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu menjelaskan, langkah-langkah dimaksud setelah dirinya insentif bertemu dengan masyarakat di dapilnya.

"Sejak saya dilantik menjadi Wakil Rakyat di DPR, saya kerap bertemu dengan masyarakat. Tak cuma saat reses. Dari sinilah banyak aspirasi yang masuk terkait soal hasil panen padi," ujar Syaikh.

Ada dua aspirasi yang mengemuka yakni perlunya dukungan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Seperti diketahui, Dapil Jabar VII adalah kawasan pertanian yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Hal itu karena luasnya lahan pertanian yang ada dan tingginya angka produktifitas hasil panen.



Menurut Syaikhur, kebijakan pada era terdahulu yang menyediakan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya, membuat produktifitas hasil pertanian meningkat. Sehingga dikenal sebagai lumbung padi nasional.

Namun sayangnya, dua tahun terakhir, ada tren pelambatan angka produksi. Menurut data dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta tahun 2019, peningkatan produktivitas padi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat sedikit. Dari luas panen 310.344 hektar, pada tahun 2017 dihasilkan 2,22 Juta Ton GKP pada tahun 2018 bertambah menjadi 2,37 juta Ton GKP. Bahkan di Kabupaten Bekasi sudah mengalami penurunan.

Dari luas panen 97.577 hektar, pada tahun 2017 bisa menghasilkan 611.386 Ton GKP. Tetapi tahun 2018 hanya bisa menghasilkan 573.928 Ton GKP.

"Tren pelambatan ini sangat mengkhawatirkan dan perlu segera diatasi," kata Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu melihat setidaknya ada tiga penyebabnya.

Pertama, sejalan dengan pertumbuhan industrialisasi dan perumahan, terjadi banyak alih fungsi lahan pertanian produktif untuk dijadikan kawasan industri dan perumahan. Disamping itu kondisi infrastruktur pertanian masih banyak yang rusak atau tidak terpelihara dengan baik. Bahkan tidak terjadi penambahan infrastruktur pertanian yang diperlukan oleh masyarakat.

Sebagai contoh, kondisi infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Karawang. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang Tahun 2019, menunjukkan bahwa Infrastruktur saluran irigasi baik sekunder maupun tersier yang masih baik hanya 1.025 KM dari 2.242 KM atau 45,72% saja. Sedangkan 475 KM (21,19 %) rusak sedang dan 769 (34,30 %) rusak berat.

"Ini data yang menyedihkan bagi saya," kata Syaikh.

Kedua, terbatasnya tenaga penyuluh pertanian, baik pusat maupun daerah, yang handal yang dapat memberikan

edukasi pertanian kepada para petani. Hal ini berdampak pada produktifitas hasil pertanian yang tidak meningkat. Terlebih lembaga yang menaungi karena perubahan UU 32 menjadi 23 tentang Pemerintahan Daerah menggerus BP4K (Badan Penyuluh Pertanian Perikanan Peternakan dan Kehutanan) di Kabupaten menjadi tiada. Sehingga secara eksistensi keberadaannya menjadi lemah.

Ketiga, sulitnya bibit pada musim tanam, mahalnya pupuk untuk menyuburkan tanaman dan kelemahan permodalan petani menyebabkan banyak di antara petani yang jatuh ke dalam perangkap tengkulak atau rentenir. Kita mengenalnya sebagai Bank Emok. Hal ini menyebabkan pada saat panen para petani tidak memiliki bargaining position yang kuat untuk menentukan harga jual hasil pertanian. Dampaknya, keuntungan yang diperoleh para petani sangat kecil, bahkan tidak jarang kemungkinan menderita kerugian. Dampak lebih lanjut adalah berkurangnya minat anak-anak muda millennial yang bergerak di sektor pertanian.

"Dalam jangka Panjang tentu hal ini akan sangat membahayakan mengingat kebutuhan stok pangan nasional dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan," papar Syaikhu.

Dalam upaya untuk menjaga lahan pertanian yang berkesinambungan, Pemerintahan Jawa Barat telah

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Demikian juga Pemeritahan Kabupaten Karawang telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Syaikhu meminta Pemerintah harus mendukung upaya menjaga lahan pertanian berkesinambungan dan meningkatkan produktifitas hasil panen. Caranya dengan melakukan 8 langkah sebagai berikut:

Pertama, melalui Kementerian Pertanian serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan memberikan perlindungan kepada para petani dan terhadap hasil pertanian, sebagaimana diamanahkan dalam UU no 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Kedua, memberi insentif kepada para petani agar lahan pertanian yang dimilikinya tidak dibebani atau dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Ketiga, memberikan subsidi bibit dan subsidi pupuk.

Keempat, memberikan alat mesin pertanian kepada para petani atau kelompok tani, dalam upaya meningkatkan produktifitas hasil pertanian.

Kelima, menyiapkan Tenaga Penyuluh pertanian yang

handal yang mampu memberikan edukasi pertanian kepada para petani.

Keenam, memperbaiki infrastruktur pertanian yang rusak dan menyiapkan infrastruktur pertanian yang masih kurang.

Ketujuh, memberikan Kredit Usaha Rakyat kepada para petani tanpa bunga.

Kedelapan, membantu menyerap pasar hasil pertanian dengan memfungsikan kembali Bulog.

"Dengan melakukan hal-hal tersebut, insya Allah para petani akan kembali berdaya dan semangat untuk membangun sektor pertanian akan mampu menjaga kestabilan stok pangan nasional," pungkas Syaikh.

AHMAD SYAIKHU SERAP ASPIRASI WARGA KARANGLIGAR KARAWANG YANG TERKENA BANJIR PARAH

Anggota DPR RI Ahmad Syaikh mengunjungi warga Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Kedatangan Politisi PKS itu untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan menyerap aspirasi tokoh dan warga setempat.



Di wilayah ini, banjir parah kerap terjadi. Air surut memerlukan waktu sekitar satu bulan. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama.

Ada dua solusi mendesak yang disampaikan tokoh dan warga Karangligar. Yakni melakukan normalisasi Sungai Cibeet dan pembangunan pintu air di bendungan Cibeet yang membatasi wilayah Karawang-Bekasi di Kaligandu, Kecamatan Telukjambe Barat.

Menanggapi itu, Ahmad Syaikhu meminta semua pihak terkait untuk bersinergi dan segera melakukan permintaan warga.

"Permintaan warga harus segera dilakukan. Semua pihak terkait harus bersinergi," kata Syaikhu dihadapan ratusan warga dan tokoh Karangligar.

Syaikhu langsung meminta kepada Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Suwarno yang juga hadir.

"Tolong segera Pak Suwarno. Nanti saya akan sampaikan juga ke Menteri PUPR," ujar Syaikh lagi yang lolos sebagai Anggota DPR dari Dapil VII Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Dinas PUPR Kab. Karawang, Kepala Desa, Kapolsek, Danrmail dan lainnya.

SYAIKHU FOKUS PERJUANGKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

Anggota DPR RI Ahmad Syaikh akan fokus untuk memperjuangkan pengembangan infrastruktur sektor pertanian yang ada di daerah pemilihan VII Jawa Barat. Yakni di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Hal ini dilakukan berdasarkan aspirasi yang dia peroleh pada kegiatan reses yang dihelat beberapa waktu lalu.

Syaikh menjelaskan, tiga wilayah itu masih didominasi lahan pertanian. Rencana pengembangan infrastruktur ini penting untuk menunjang aktivitas pertanian yang ada di wilayah ini.

"Selama ini infrastruktur yang sudah ada sejak dulu itu ternyata tidak mengalami perkembangan yang signifikan,



bahkan infrastruktur yang ada malah sudah rusak," katanya kepada Radar Bekasi, Kamis (30/1).

Mantan wakil wali Kota Bekasi ini menyampaikan, lahan pertanian di tiga wilayah tersebut juga perlu dijaga agar tidak beralih fungsi. Menurutnya hal ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan tentang lahan pertanian berkesinambungan seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang.

"Karena bagaimanapun juga kebutuhan pangan kedepan makin besar dan lumbung pangan nasional ini berada di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Indramayu," ujarnya.

Lebih jauh dia menambahkan, pihaknya juga berencana memiliki desa binaan di Cilamaya, Kabupaten Karawang.

"Saya dan kawan-kawan ini sebagaimana amanah dari partai, kita ingin mewujudkan desa binaan terkait dengan pertanian. Jadi memadukan pertanian, peternakan dan perikanan. Maka kita di daerah Karawang, di Cilamaya, insyallah kita akan membuat namanya Integrated Asyik Farm," tuturnya.

PELAYANAN BURUK, AHMAD SYAIKHU: TUNDA KENAIKAN TARIF JALAN TOL DALAM KOTA!

Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol dalam kota mendapat tanggapan dari Anggota Komisi V F-PKS Ahmad Syaikh.

Menurut anggota legislatif itu, ada ketidakadilan terkait kebijakan tersebut, sehingga kenaikan tersebut harus ditunda.

Syaikh menyoroti besaran kenaikan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1231/KPTS /M/2019.

Dia menegaskan kenaikan tarif tol semestinya diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Fakta memperlihatkan pelayanan tol dalam kota merosot kualitasnya.

"Kita bisa Standar Pelayanan Minimum. Lihat saja, arus lalu lintas masih macet parah. Jalan masih banyak yang perlu diperbaiki. Tidak cepatnya respon operator jalan tol dalam membantu bila ada kendaraan yang mengalami trouble. Bahkan sejumlah ruas jalan masih tergenang banjir saat hujan deras seperti belum lama ini terjadi. Jelas pelayanan masih buruk," ujar Ahmad Syaikhu.

Karenanya, dia menegaskan seharusnya tol dalam kota dikurangi tarifnya, bukan malah dinaikkan. "Saya minta Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol mengevakuasi pelayanan tol dalam kota," cetusnya.

Merujuk pada Kepmen PUPR di atas, tarif tol mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan dan ada penyesuaian tarif, yakni:

1. Golongan I : Rp.10.000,-
2. Golongan II (2019) : Rp. 15.000,-
3. Golongan III (2019): Rp. 17.000,-

Tarif Golongan II (2017) mengalami kenaikan hingga 30,43% sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan. Padahal, pemilik kendaraan jenis ini di dominasi oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM).



Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV (2017) dan V (2017) (sekarang menjadi Golongan III (2019)) yang mayoritas dimiliki oleh korporasi.

Terakhir tarif tol ini mengalami kenaikan pada Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan tarif yang lalu, maka golongan I mengalami kenaikan sebesar 5,26%, Golongan II (2017) naik sebesar 30,43%, Golongan III (2017) turun sebesar 3,22% (sekarang menjadi Golongan II (2019)), Golongan IV (2017) turun sebesar 10,52% (sekarang menjadi Golongan III (2019)), Golongan V (2017) turun sebesar 26,09% (sekarang menjadi Golongan III (2019)).

Sesuai aturan yang tercantum dalam UU No. 38

tahun 2004 tentang jalan, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan 2 tahun sekali. Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan memberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota baru untuk ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Selain tidak adil terhadap pengguna jalan tol Golongan II (2017), Syaikh juga mengkritisi kenaikan yang mencapai 30,43%. Sebab, itu melanggar Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Jika tetap dinaikkan, pemerintah harus tetap berpedoman kepada Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pasal 67 dimana penyesuaian tarif tol harus ditetapkan berdasarkan laju inflasi. Dan juga memastikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terpenuhi dengan memperhatikan kepuasan pelanggan pengguna tol.

Berdasarkan inflasi 2018 dan 2019, dengan asumsi SPM terpenuhi, maka seharusnya kenaikan tidak melebihi 4% dari tarif sebelumnya. Sesuai Pasal 48 ayat (1), Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

"Melihat segala persoalan di atas, Ditambah daya

beli masyarakat yang masih lemah, pemerintah sudah seharusnya menunda kenaikan tarif jalan tol," pungkas Syaikhu yang berasal dari Dapil VII Jabar yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

...